

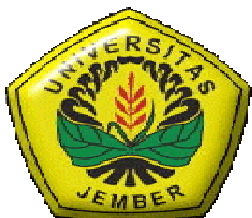
ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXVI/2011

MAJALAH ILMIAH

**HUKUM
DAN
MASYARAKAT**

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (*Folklore*) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

HUKUM DAN MASYARAKAT

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

HUKUM DAN MASYARAKAT

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember

Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember

Penanggung Jawab	: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum
Ketua Penyunting	: I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
Dewan Penyunting	: 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum
Penyunting Pelaksana	: 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H.
Pelaksana Administrasi	: 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono

HUKUM DAN MASYARAKAT adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya.

Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi.

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. (0331) 335462,322808, 322809
Fax : (0331) 330482
<http://www.fh.unej.ac.id>
majalahhukum_fh@unej.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Hukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum.

Pada edisi **II/TH.XXXVI/2011** ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : **Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.**

Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga!

Dewan Redaksi,

DAFTAR ISI

	Halaman
PengantarRedaksi	i
Daftar Isi	ii
Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	1
Edy Wahjuni, SH.,M.Hum. : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha	19
Warah Atikah, S.H.,M.Hum : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern	33
Halif, S.H.,M.H. : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	53
Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	73
Siti Sudarmi, S.H., M.H. : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak	85
Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan	103
Ketentuan Naskah	116

**PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA
MOTOR YANG MELANGGAR
PERATURAN LALU LINTAS JALAN**

Oleh : Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

Abstraksi

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB), khususnya bagi pengendara sepeda motor. Pelimpahan perkara pidana ini ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh penyidik atas kuasanya sendiri. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor tidak mempersoalkan adanya pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang dikenal dengan *strict liability*. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut dapat berupa pidana kurungan atau pidana denda

Kata Kunci : Acara Pemeriksaan Cepat, Pertanggungjawaban Pidana, Penjatuhan Pidana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diperiksa dengan tiga macam acara, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Acara

pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHP, acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHP dan acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHP. Acara pemeriksaan cepat terbagi ke dalam :